PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

Nomor: PU.02.06/WB-0A.0001/2024

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis, 15 Agustus 2024 di Jakarta, antara pihak yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Yomil Ravianda,** PT. Wijaya Karya Beton Tbk. sesuai SK Direksi Nomor : SK.02.01/WB-0A.0123/2022 tanggal 15 Maret 2022, yang beralamat di Jl. Letjen M.T. Haryono No.12, RT.8/RW.2, Kota Jakarta-Timur, (untuk selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**").

2. **Hermawan Santoso**, Warga Negara Indonesia, umur 54 Tahun, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Lahat pada tanggal 08 April 1970, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3201320804700003, beralamat di KP. Tegal, Kembang Kuning, Kec. Klapanunggal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**").

Kemudian **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**Para Pihak**".

Dengan ini masing-masing bertindak dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **Pihak Pertama** adalah suatu perseroan terbatas yang ruang lingkup kegiatan usahanya bergerak di bidang industri beton pracetak dan jasa konstruksi serta kegiatan usaha lain yang terkait, yang membutuhkan tenaga kerja waktu tertentu untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan di salah satu unit usaha Perseroan, yaitu Wilayah Penjualan Luar Negeri (WPLN).

b. Bahwa **Pihak Kedua** memiliki kompetensi dalam bidang pekerjaan yang dibutuhkan dan bersedia memenuhi kebutuhan **Pihak Pertama** untuk bekerja sebagai tenaga kerja waktu tertentu dengan standar dan spesifikasi yang dibutuhkan oleh **Pihak Pertama** dan ditempatkan di lokasi kerja yang ditunjuk oleh **Pihak Pertama**.

Selanjutnya, untuk maksud sebagaimana telah diuraikan diatas, **Para Pihak** sepakat untuk membuat Perjanjian dan mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

ty

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu selanjutnya disebut PKWT yang merupakan perjanjian kerja antara **Pihak Kedua** dengan **Pihak Kesatu** untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
2. Keputusan Perusahaan adalah keputusan yang dibuat oleh Perusahaan secara tertulis sebagai pelaksanaan dari Perjanjian ini dan pelaksanaan dari Peraturan Perusahaan.
3. Tenaga Kerja Waktu Tertentu adalah setiap individu yang mampu melakukan pekerjaan untuk kepentingan **Pihak Pertama** berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Pihak Pertama menyatakan menunjuk dan memberikan tugas kepada **Pihak Kedua** sebagai Tenaga Kerja Waktu Tertentu untuk melaksanakan pekerjaan di lokasi yang ditunjuk oleh **Pihak Pertama**, dan **Pihak Kedua** menerima serta bersedia melaksanakan dengan baik tugas sebagai Tenaga Kerja Waktu Tertentu untuk keperluan Pelaksanaan Proyek Metro Manilla Subway Project CP-102 di Filipina ("selanjutnya disebut Pekerjaan atau Proyek") yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Wilayah Penjualan Luar Negeri (WPLN).

PASAL 3
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

1. Sebagai Tenaga Kerja Waktu Tertentu, tugas dan tanggung jawab **Pihak Kedua** adalah melaksanakan tugas sebagai Kepala Seksi Peralatan di Wilayah Penjualan Luar Negeri (WPLN) dengan rincian tugas yang diberikan.
2. Deskripsi pekerjaan dan tanggung jawab **Pihak Kedua** antara lain sebagai berikut:
   a. Mengkoordinir kegiatan peralatan yang mana meliputi merencanakan, melaksanakan, dan memastikan kegiatan pengelolaan peralatan sesuai dengan sasaran.
   b. Melakukan koordinasi dan evaluasi serta melakukan pelaporan atas hasil pekerjaan kepada Manajer Proyek, termasuk menyampaikan kendala yang dihadapi di lingkup pekerjaan;

ty

c. Mencapai KPI (*Key Performance Indicator*) yang telah ditentukan oleh **Pihak Pertama**;

d. Mendukung segala proses yang dapat membantu kelancaran kegiatan di Pelaksanaan Proyek Filipina – Wilayah Penjualan Luar Negeri (WPLN);

3. Dalam melaksanakan tugas di atas, **Pihak Kedua** wajib dengan kemampuan terbaiknya untuk mengikuti dan memenuhi tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur oleh **Pihak Pertama**.

4. **Pihak Pertama** dapat sewaktu-waktu mengubah tugas dan tanggung jawab **Pihak Kedua** sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, serta mengubah rincian tugas dan tanggung jawab **Pihak Kedua** sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan **Pihak Pertama**, dengan pemberitahuan tertulis kepada **Pihak Kedua**.

5. **Pihak Pertama** berhak untuk sewaktu-waktu mengubah lokasi kerja **Pihak Kedua** sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan **Pihak Pertama**, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada **Pihak Kedua**.

6. Dalam hal **Pihak Kedua** tidak dapat memenuhi tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan pada ayat 2 di atas, maka **Pihak Pertama** berhak untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja **Pihak Kedua**. Apabila setelah evaluasi **Pihak Kedua** tetap tidak dapat memenuhi tugas dan tanggung jawab yang ditentukan maka **Pihak Pertama** berhak untuk memberikan surat peringatan sebagaimana yang diatur pada Pasal 12 Perjanjian ini.

7. **Pihak Pertama** berhak memberikan instruksi yang diperlukan dan **Pihak Kedua** harus mampu dan memahami semua prosedur, tugas, dan tanggung jawab yang diperlukan.

8. **Pihak Kedua** wajib melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaannya secara berkala dan bertanggung jawab kepada atasan terkait atau pejabat yang diberikan wewenang.

9. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, **Pihak Kedua** wajib mematuhi semua kebijakan **Pihak Pertama**, prosedur, *code of conduct* dan peraturan perusahaan serta peraturan perundangan yang berlaku.

PASAL 4
JANGKA WAKTU KESEPAKATAN KERJA

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal **20 Agustus 2024** sampai dengan **19 Agustus 2025.**

ty

2. Apabila terdapat kebutuhan perpanjangan, maka **Pihak Pertama** dapat memperpanjang waktu kontrak dengan terlebih dahulu kepada **Pihak Kedua** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum masa Perjanjian kerja berakhir.

3. Selama masa perjanjian, **Pihak Pertama** berhak untuk memutuskan hubungan kerja apabila performa **Pihak Kedua** di masa kerja tersebut dianggap tidak mampu, tidak mencapai ekspektasi, gagal menyelesaikan tugas dengan baik, atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan **Pihak Pertama**.

4. Dalam hal perjanjian ini berakhir sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan tanpa adanya perpanjangan perjanjian yang disepakati bersama **Para Pihak**, atau karena alasan sebagaimana dimaksud perjanjian ini, maka hubungan kerja akan putus dengan sendirinya.

5. Dalam hal **Pihak Kedua** mengajukan pengunduran diri sebelum jangka waktu kesepakatan kerja sebagaimana diatur dalam pasal ini berakhir, maka **Pihak Kedua** harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada **Pihak Pertama** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum hari efektif pengunduran diri dan melakukan serah terima kepada atasannya atas semua pekerjaan, serta menyerahkan semua aset inventaris **Pihak Pertama** yang digunakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari efektif pengunduran dirinya.

PASAL 5
WAKTU KERJA

1. Waktu kerja **Pihak Kedua** dalam setiap 3 (tiga) bulan adalah 10 (sepuluh) minggu kerja dan 2 (dua) minggu libur.

2. Waktu kerja adalah hari dan jam kerja yang ditetapkan oleh Perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Waktu kerja yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

    a. Jumlah hari kerja dalam seminggu adalah 6 (enam) hari yaitu Senin sampai Sabtu.

    b. Jumlah jam kerja siang dalam seminggu adalah 48 (empat puluh delapan) jam efektif.

    c. Pengaturan waktu kerja **Pihak Kedua** ditetapkan oleh pimpinan unit kerja.

ty

4. Jika diperlukan dan diminta **Pihak Pertama**, **Pihak Kedua** bersedia melakukan pekerjaan di luar jam kerja sebagaimana dimaksud ayat 3 di atas termasuk pada saat istirahat mingguan serta hari libur resmi atau hari raya.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama berkewajiban membina hubungan kerja yang harmonis agar tercipta ketenangan kerja dan ketenangan usaha.

1. **Pihak Kedua** berhak:
   a. Menerima honor dan tunjangan-tunjangan dari **Pihak Pertama** sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
   b. Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
   c. Memperoleh jaminan kesehatan berupa program jaminan sosial kesehatan komersial yang ditunjuk oleh **Pihak Pertama** dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan kebijakan/Peraturan Perusahaan dan/atau ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
2. **Pihak Kedua** berkewajiban untuk:
   a. Mentaati dan bersedia menerima tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan tersebut serta tugas-tugas lain yang diberikan **Pihak Pertama** dengan sebaik-baiknya.
   b. Memenuhi dan melaksanakan seluruh tugas dan ketentuan yang telah diuraikan dalam uraian pekerjaan (*job description)*, pedoman, peraturan perusahaan, Kebijakan Operasi dan Tata Tertib Perusahan maupun ketentuan lain yang menjadi Keputusan Direksi dan Manajemen **Pihak Pertama**.
   c. Merahasiakan semua informasi mengenai **Pihak Pertama** yang diterima atau diketahui olehnya dan tidak memberikan dokumen atau informasi yang diketahui baik secara lisan maupun tertulis, gambaran, rekaman, laporan, video, dan segala macam bentuk yang mengandung informasi **Pihak Pertama** ke pihak lainnya. Sanksi akan diberikan bila **Pihak Kedua** melanggar dengan menyebarkan informasi.
   d. Dalam hal **Pihak Kedua** tidak lagi bekerja di **Pihak Pertama**, maka **Pihak Kedua** wajib menyerahkan dan mengembalikan semua informasi mengenai **Pihak Pertama** yang diterima atau diketahui olehnya, baik karena jabatannya, atau karena sebab lain termasuk semua informasi maupun data dalam bentuk *hard copy*, *email, Gdrive*,

f7

CD, *USB*, maupun dalam bentuk media lainnya kepada atasannya. Sanksi akan diberikan bila **Pihak Kedua** melanggar dengan menyimpan informasi tersebut.

e. Memenuhi kode etik yang berlaku di perusahaan.

f. Bekerja dengan jujur, cermat, tertib dan bersemangat untuk kepentingan **Pihak Pertama** sesuai posisi jabatan yang di tempati.

g. Berpakaian rapi dan sopan, serta bertingkah laku sopan dan saling menghormati terhadap sesama dan atasan.

h. Bersedia ditempatkan dimana saja apabila sewaktu-waktu ditugaskan oleh **Pihak Pertama**.

i. Bertanggung jawab penuh terhadap peralatan kerja **Pihak Pertama** dan wajib menjaganya dengan baik.

j. Memahami, mengikuti dan menerapkan prosedur HSE **Pihak Pertama** (*Health, Safety and Environment*) untuk menjaga keamanan dan keselamatan kerja.

k. **Pihak Kedua** dengan ini menyatakan komitmen bekerja untuk **Pihak Pertama** dan tidak sedang maupun akan terikat kontrak/pekerjaan dengan Pihak Lain selama jangka waktu Perjanjian ini berlangsung.

PASAL 7
SISTEM PENDAPATAN

1. **Pihak Kedua** berhak mendapatkan upah bersih (*lump sum*) sebesar **Rp. 23.500.000 (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** setiap bulannya di luar pajak penghasilan (PPh 21) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Upah bersih (*lump sum*) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas akan dibayarkan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** selambat-lambatnya pada hari terakhir setiap bulannya dengan cara transfer ke rekening **Pihak Kedua** atau dengan cara lain yang telah disepakati bersama oleh **Para Pihak**.

PASAL 8
TUNJANGAN DAN FASILITAS

1. **Pihak Kedua** berhak diikutsertakan oleh **Pihak Pertama** dalam program **BPJS Ketenagakerjaan** (Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua) serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ty

2. **Pihak Kedua** berhak diikutsertakan oleh **Pihak Pertama** dalam fasilitas jaminan sosial kesehatan komersial atau **BPJS kesehatan** sesuai perundang-undangan yang berlaku, asuransi jiwa, serta lembaga asuransi kesehatan di Filipina yang ditentukan oleh **Pihak Pertama**.
3. **Pihak Kedua** dengan ini bersedia untuk menanggung selisih biaya yang disebabkan kelebihan biaya asuransi kesehatan (Rawat Inap, Operasi dan lain-lain), yang dibayarkan tunai kepada pihak Asuransi melalui **Pihak Pertama** atau dengan cara pemotongan pendapatan **Pihak Kedua.**
4. Menjelang Hari Raya, **Pihak Pertama** akan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada **Pihak Kedua** yang masa kerjanya 1 (satu) bulan atau lebih secara terus menerus tetapi belum mencapai 12 (dua belas) bulan, maka THR diberikan secara prorata.
5. Metode pemberian dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya atau sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh **Pihak Pertama**.
6. **Pihak Kedua** dapat memperoleh bonus/ insentif sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan **Pihak Pertama** yang diberikan dengan biaya atas pajak menjadi beban **Pihak Kedua**.
7. **Pihak Kedua** memperoleh transport tiket pesawat Pulang – Pergi (PP) Filipina – Indonesia sebanyak-banyaknya 3 (bulan) bulan 1 (satu) kali yang disediakan oleh **Pihak Pertama**.
    a. Apabila karena kebutuhan **Pihak Pertama** atau terdapat kondisi tertentu yang mengharuskan pihak kedua tetap bekerja selama 3 (tiga) bulan maka tiket Pulang – Pergi (PP) dapat diuangkan.
    b. Apabila terdapat kepentingan pribadi dari **Pihak Kedua** maka tiket Pulang – Pergi (PP) menjadi tanggungan **Pihak Kedua**.
8. **Pihak Kedua** memperoleh fasilitas tempat tinggal yang disediakan oleh **Pihak Pertama.**
9. **Pihak Kedua** memperoleh fasilitas makan dalam bentuk makanan ataupun dalam bentuk uang pengganti makan yang diberikan sesuai dengan anggaran dan kemampuan **Pihak Pertama**.

PASAL 9

IZIN SAKIT/ PENTING

1. Izin sakit

   Pihak Kedua yang tidak dapat masuk kerja karena sakit harus memberitahukan kepada **Pihak Pertama** melalui telepon, surat dokter atau surat izin tersendiri. Apabila sakit dan membutuhkan istirahat lebih dari 1 (satu) hari, maka harus melampirkan surat dan resep dokter kepada **Pihak Pertama**.

2. Izin penting

   Pihak Kedua yang tidak dapat masuk kerja karena ada kepentingan lain diluar kepentingan perusahaan harus memberitahukan dan memperoleh izin terlebih dahulu dari **Pihak Pertama**.

PASAL 10

LARANGAN-LARANGAN BAGI PIHAK KEDUA

1. **Pihak Kedua** dilarang melakukan pelanggaran, baik berupa pelanggaran ringan maupun pelanggaran berat, dengan alasan mendesak maupun bertingkah laku yang dapat merugikan **Pihak Pertama**.
2. Perbuatan atau tingkah laku yang termasuk pelanggaran ringan dan dapat dikenakan surat peringatan tertulis atau sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Perjanjian ini, antara lain meliputi:
   a. Sering datang terlambat atau pulang mendahului waktu yang telah ditentukan.
   b. Tidak mematuhi ketentuan-ketentuan dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku, peraturan/ tata tertib **Pihak Pertama**, keselamatan kerja, petunjuk atasan, dan lain sebagainya.
   c. Menolak perintah pekerjaan yang telah diberikan kepada **Pihak Kedua**.
   d. Melakukan kewajiban secara serampangan atau sering lalai dalam melaksanakan tugas.
   e. Tidak memenuhi performa atau tidak cakap melakukan pekerjaan/ tugasnya.
   f. Melakukan bisnis sampingan lain dalam bentuk apapun selama bekerja dengan **Pihak Pertama** yang dapat mengakibatkan turunnya performansi atau kinerja **Pihak Kedua** dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada **Pihak Pertama**.
   g. Mengikuti serta melakukan unjuk rasa yang berhubungan dengan ketenagakerjaan baik di dalam maupun di luar **Pihak Pertama** tanpa adanya izin yang sah terlebih dahulu.
   h. Melakukan pekerjaan lain maupun terikat dengan Pihak Lain selama jangka waktu Perjanjian ini berlangsung.
   i. Melakukan penyebaran/pemberian informasi milik **Pihak Pertama** baik seluruh maupun sebagian.
   j. Melakukan wanprestasi dalam bentuk apapun.

ty

3. **Pihak Pertama** dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), karena pelanggaran berat akibat perbuatan **Pihak Kedua** yang merugikan **Pihak Pertama**, yaitu apabila **Pihak Kedua** melakukan hal-hal sebagai berikut:

   a. Penipuan, pencurian dan penggelapan barang/ uang milik **Pihak Pertama** atau milik teman sekerja atau milik tempat **Pihak Kedua** bertugas/ ditugaskan; atau

   b. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan **Pihak Pertama** atau kepentingan Negara; atau

   c. Mabuk, minum-minuman keras yang memabukkan, madat, memakai obat bius atau menyalahgunakan obat-obatan terlarang atau obat-obatan perangsang lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, di tempat kerja dan di tempat-tempat yang ditetapkan **Pihak Pertama**; atau

   d. Melakukan segala macam perjudian dan bertengkar atau berkelahi dengan sesama pekerja/ pimpinan di dalam maupun di luar lingkungan kerja; atau

   e. Membawa senjata api/ tajam ke dalam lingkungan kerja; atau

   f. Menyerang, mengintimidasi atau menipu pekerja/ pimpinan baik di dalam lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja; atau

   g. Menganiaya, mengancam secara fisik atau mental, menghina secara kasar sesama pekerja/ pimpinan; atau

   h. Dengan ceroboh atau sengaja merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik **Pihak Pertama**; atau

   i. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan diri atau teman sekerjanya dalam keadaan bahaya; atau

   j. Membongkar atau membocorkan rahasia **Pihak Pertama** atau mencemarkan nama baik **Pihak Pertama;** atau

   k. Melakukan perbuatan lainnya di dalam lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja yang diancam pidana; atau

   l. Memberi atau menerima imbalan jasa dalam bentuk apapun dari pihak lain, untuk melakukan hal-hal yang merugikan atau mengurangi keuntungan atau menambah biaya **Pihak Pertama**; atau

   m. Mangkir selama 3 (tiga) hari kerja berurut-turut atau lebih tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah.

17

PASAL 11

PEMBERIAN SURAT PERINGATAN DAN SANKSI

1. **Pihak Kedua** yang melakukan perbuatan melanggar hukum, melanggar peraturan perusahaan, melanggar larangan dan tata tertib atau bertingkah laku yang merugikan **Pihak Pertama** dapat dikenakan sanksi.
2. Sanksi yang dapat dikenakan oleh **Pihak Pertama** adalah sebagai berikut:
   a. Peringatan lisan; atau
   b. Peringatan tertulis; atau
   c. Penurunan tingkat jabatan; atau
   d. Penurunan tingkat honor; atau
   e. Denda atau penggantian atas kerugian **Pihak Pertama**; atau
   f. Pemutusan Hubungan Kerja; atau
   g. Melaporkan dan menyerahkan **Pihak Kedua** kepada pihak berwajib.
3. Surat Peringatan (SP) tertulis dapat berupa peringatan pertama, kedua, dan ketiga (yang terakhir) dan tidak harus diberikan menurut urut-urutannya, tetapi dinilai dari jenis pelanggaran yang dilakukan **Pihak Kedua**.
4. Apabila **Pihak Kedua** tidak mengindahkan teguran setelah melalui Surat Peringatan ketiga (terakhir), atau mengulangi tindakan pelanggaran, maka **Pihak Kedua** dapat dikenakan sanksi yang lebih berat atau wajib untuk mengundurkan diri atau dapat dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh **Pihak Pertama** sebelum masa perjanjian ini berakhir.
5. Pemberian sanksi oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** sebagaimana diuraikan di atas tidak menghapuskan hak dari **Pihak Pertama** untuk menuntut dan memproses pelanggaran **Pihak Kedua** melalui jalur hukum, baik secara perdata maupun pidana ke pengadilan yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 12

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA/PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

1. Perjanjian ini akan berakhir apabila :
   a. **Pihak Kedua** meninggal dunia;
   b. Habisnya masa kerja sesuai dengan yang tercantum dan disepakati di dalam Perjanjian ini;

c. **Pihak Kedua** mengundurkan diri secara tertulis atas kemauan sendiri;

d. **Pihak Kedua** tidak dapat menunjukkan kinerja/ performa sesuai kriteria penilaian **Pihak Pertama**;

e. **Pihak Kedua** kurang disiplin dan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan dan ketentuan-ketentuan peraturan yang diterapkan oleh **Pihak Pertama**.

2. Jika Perjanjian ini berakhir karena alasan-alasan sebagaimana disebutkan pada ayat 1 di atas, maka **Pihak Pertama** tidak berkewajiban memberikan uang jasa maupun ganti rugi berupa apapun kecuali sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. **Pihak Pertama** dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pelanggaran berat akibat perbuatan **Pihak Kedua** yang merugikan **Pihak Pertama**, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat 3 Perjanjian ini.

4. **Pihak Kedua** dan **Pihak Pertama** sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya ketentuan yang mengharuskan adanya putusan pengadilan untuk pengakhiran suatu perjanjian, sehingga untuk pengakhiran perjanjian ini tidak diperlukan adanya putusan pengadilan.

PASAL 13
KONDISI SETELAH BERAKHIRNYA HUBUNGAN KERJA

1. Setelah pengakhiran perjanjian ini, **Pihak Kedua** harus menyerahkan kepada **Pihak Pertama** seluruh properti, yang dimana properti atau yang berhubungan dengan usaha **Pihak Pertama** termasuk namun tidak terbatas pada seluruh dokumen dan benda-benda yang disebutkan pada perjanjian ini dan juga seluruh properti milik **Pihak Pertama** yang berada pada penguasaan, pemeliharaan, pengawasan **Pihak Kedua**.

2. Mengembalikan semua informasi mengenai **Pihak Pertama** yang diterima atau diketahui olehnya, baik karena jabatannya, atau karena sebab lain termasuk semua informasi maupun data dalam bentuk *hard copy*, *email*, *disket*, *CD*, *USB*, maupun dalam bentuk media lainnya kepada atasannya. Sanksi akan diberikan bila **Pihak Kedua** melanggar dengan menyimpan informasi.

3. Apabila perjanjian ini berakhir karena alasan-alasan sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 perjanjian, maka terhitung sejak pemberhentian **Pihak Kedua** tersebut, **Pihak Kedua** tidak lagi mempunyai hubungan kerja atau kaitan apapun dengan **Pihak Pertama** dan oleh karenanya **Pihak Kedua** tidak akan mengajukan segala tuntutan, klaim dan gugatan

ty

apapun kepada **Pihak Pertama** sehubungan dengan berakhirnya hubungan kerja tersebut dan/ atau perjanjian ini.

PASAL 14
KERAHASIAAN

1. **Pihak Kedua** wajib merahasiakan semua data, dokumen, keputusan dan/ atau informasi mengenai data yang dianggap rahasia oleh **Pihak Pertama** baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak manapun, dalam hal terdapat data dokumen, keputusan dan/ atau informasi yang dianggap rahasia oleh **Pihak Pertama** harus diberikan kepada pihak manapun maka **Pihak Kedua** wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari **Pihak Pertama**.
2. Dalam hal **Pihak Kedua** diharuskan untuk memberikan data, dokumen, keputusan dan/ atau informasi yang dianggap rahasia oleh **Pihak Pertama** disebabkan adanya permintaan dari institusi pemerintah yang berwenang maka **Pihak Kedua** wajib untuk melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **Pihak Pertama** dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 hari terhitung sejak adanya permintaan.
3. Dalam hal **Pihak Kedua** tidak lagi dipekerjakan oleh **Pihak Pertama** untuk alasan apa pun, **Pihak Kedua** harus sesegera mungkin mengembalikan kepada **Pihak Pertama**, seluruh keterangan, *email*, *chat, posts*, data, program, sistem, dokumen-dokumen, surat-surat, catatan-catatan, notulen, akta-akta, ringkasan, skema, *spreadsheet, slide*, gambar dan rekaman-rekaman yang terkait dan/ atau informasi rahasia lainnya yang berhubungan dengan cara apa pun dengan usaha **Pihak Pertama**, dan seluruh salinan atasnya, yang berada dalam kepemilikan atau pengendalian **Pihak Kedua**.
4. **Pihak Kedua** tidak diperbolehkan memperbanyak, membuat rekaman ataupun menduplikasi informasi yang dianggap rahasia oleh **Pihak Pertama** kecuali untuk memenuhi permintaan dari institusi pemerintah yang berwenang.
5. Klausula kerahasiaan ini tetap berlaku meskipun perjanjian ini telah berakhir dan/ atau diputuskan oleh salah satu pihak.
6. **Pihak Kedua** wajib menandatangani perjanjian kerahasiaan dan larangan pengungkapan rahasia (*Non-Disclosure Agreement*) bila secara khusus dimintakan oleh **Pihak Pertama**.
7. Apabila diketahui selama **Pihak Kedua** masih bekerja maupun sudah tidak bekerja untuk **Pihak Pertama**, **Pihak Kedua** membocorkan segala sesuatu milik **Pihak Pertama** dan informasi rahasia **Pihak Pertama** kepada pihak lain sehingga menyebabkan kerugian

bagi **Pihak Pertama**, maka **Pihak Kedua** tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 15

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. **Para Pihak** tidak bertanggung jawab untuk segala kegagalan untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian ini jika upaya pemenuhan tertunda, terhalang, atau tercegah akibat keadaan yang berada di luar kendali yang wajar dan terjadi tanpa adanya kesalahan atau kelalaian di **Pihak** yang terkena dampak ("**Keadaan Memaksa**").
2. Hal-hal yang termasuk Keadaan Memaksa dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut:
   a. Faktor alam dan non alam meliputi banjir, kebakaran, gempa bumi, badai, pandemi dan bencana lainnya;
   b. Faktor manusia meliputi peperangan, huru-hara, pemogokan pegawai, terorisme, sabotase, demonstrasi, dan lain sebagainya;
   c. Peraturan pemerintah atau penguasa setempat yang secara langsung mempengaruhi tidak terpenuhinya kewajiban salah satu pihak atau para pihak.
3. **Pihak Pertama** tidak dapat dituntut karena kegagalan atau keterlambatan dalam melakukan setiap kewajibannya jika dapat dibuktikan secara nyata dan tertulis bahwa kegagalan atau keterlambatan tersebut terjadi diluar kontrol **para pihak** karena keadaan memaksa atau *force majeure* yang tidak dapat dihindari.
4. Bebasnya para pihak dari tanggung jawab juga berlaku dalam hal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan catatan telah dilakukannya segala tindakan pencegahan yang semestinya dilakukan secara hati-hati dan wajar yang bertujuan untuk menghindari hal-hal tersebut.
5. Dalam hal keadaan memaksa bersifat tetap (secara langsung mengakibatkan suatu pelaksanaan perjanjian yang tidak dapat dipenuhi lebih lanjut), maka para pihak akan memusyawarahkan secara bersama atas pelaksanaan selanjutnya dari perjanjian ini.
6. **Pihak Pertama** dapat memutuskan hubungan kerja dengan **Pihak Kedua** apabila karena keadaan atau situasi yang memaksa dan tak terduga tersebut mengakibatkan perjanjian ini tidak mungkin lagi untuk diwujudkan.

PASAL 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian Kerja ini dan segala akibat hukumnya, hanya tunduk pada hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perselisihan atas penafsiran dan atau pelaksanaan atas perjanjian kerja ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan asas kekeluargaan.
3. Dalam hal musyawarah seperti yang tersebut dalam ayat 2 tidak tercapai maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

PASAL 17
LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dalam surat perjanjian tersendiri (*addendum*) berdasarkan asas-asas musyawarah untuk mufakat, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
3. Setiap klausul dalam perjanjian ini secara keseluruhan akan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara penuh terhadap pewaris, eksekutor, administrator dan wakil yang sah dari pihak **Pihak Kedua**. Hal tersebut dimaksudkan bagi keutuhan penjagaan kepentingan **Pihak Pertama**, para pengganti yang akan menduduki jabatan penting pada **Pihak Pertama** dan bagi orang-orang dan/ atau lembaga-lembaga atau bentuk entitas lainnya yang memiliki hubungan kerja, perikatan, dan/ atau relasi dalam bentuk apapun dengan **Pihak Pertama**.
4. **Pihak Kedua** menyatakan bahwa:
   a. Telah membaca, mengerti sepenuhnya perjanjian ini;
   b. Telah diberikan kesempatan untuk meminta keterangan dan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang kurang dimengerti dari perjanjian ini; dan
   c. Bersedia untuk memenuhi dan melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan perjanjian ini.

ft

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat dalam rangkap **2 (dua)** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan ditandatangani oleh **Para Pihak** dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani secara sukarela, tanpa paksaan dan telah dipahami isi dan maknanya secara baik.

PIHAK PERTAMA **PT Wijaya Karya Beton Tbk,**	**PIHAK KEDUA**
Yomil Ravianda Manajer Wilayah Penjualan LN	**Hermawan Santoso**